

# **ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL DANPAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013)**

**Diaz Ardhiansyah**  
**Sri Mangesti Rahayu**  
**Achmad Husaini**  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Malang  
[diaz\\_ardhiansyah@yahoo.co.id](mailto:diaz_ardhiansyah@yahoo.co.id)

## **ABSTRACT**

*Autonomy in the regions requires for each region to be able to finance its own needs. Funding was sourced from the local revenue in which is local taxes. Batu as a tourism city has a huge potential in local tax revenue, especially hotel taxes and restaurant taxes. The purpose of this study is to analyze the potential, effectiveness, as well as the rate of growth of hotel tax and restaurant tax in 2011-2013; analyze the contribution of hotel tax and restaurant tax to PAD 2011-2013. The results of this study using the potential formula shows that the potential of hoteltax and restaurant tax is very large, potential exploration from hotel tax was 32.48% or could be said ineffective from the realization in 2011 and potential exploration for restaurant tax at 77.22% or can be told less effective than the realization in 2011 Calculation of the growth rate of tax in 2012 at 55.85% (fairly successful), for restaurant tax growth rateat 33.78% (less successful) in 2012. Calculation of the contribution hotel tax to PAD at 11.19% (less) in 2011, while for the restaurant tax revenue was 6.54% (very less) in 2011.*

**Keywords:** *hoteltax, restauranttax, potency, effectiveness, rate ofgrowth, the contribution*

## **ABSTRAK**

Otonomi daerah mengharuskan kepada setiap daerah untuk mampu membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Pembiayaan daerah itu bersumber dari pendapatan asli daerah yang di dalamnya terdapat pajak daerah. Kota Batu sebagai kota pariwisata memiliki potensi yang cukup besar dalam penerimaan pajak daerah terutama pajak hotel dan pajak restoran. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi, efektivitas, serta laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2011-2013; menganalisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD tahun 2011-2013. Hasil penelitian dengan menggunakan rumus potensi menunjukkan bahwa potensi pajak hotel dan pajak restoran sangat besar, penggalan potensi dari pajak hotel sebesar 32,48% atau bisa dikatakan tidak efektif dari realisasi tahun 2011 dan untuk pajak restoran penggalan potensinya sebesar 77,22% atau bisa dikatakan kurang efektif dari realisasi tahun 2011. Perhitungan laju pertumbuhan pajak hotel di tahun 2012 sebesar 55,85% (cukup berhasil), untuk pajak restoran tingkat laju pertumbuhannya sebesar 33,78% (kurang berhasil) di tahun 2012. Perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 11,19% (kurang) di tahun 2011, sementara untuk pajak restoran terhadap PAD sebesar 6,54% (sangat kurang) di tahun 2011.

**Kata kunci:** *Pajak hotel, Pajak restoran, potensi, efektivitas, laju pertumbuhan, kontribusi*

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “Daerah Otonom,

yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.” Dari penjelasan Undang-Undang di atas maka daerah diberi kewenangan mengatur, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerahnya menurut aspirasi masyarakatnya sendiri.

Pajak daerah memiliki kontribusi yang amat penting bagiproses pembangunan suatu daerah. Kesanggupan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggalan pajak daerah merupakan salah satu usaha pemerintah daerah dalam menerapkan otonomi daerah yaitu dengan membiayai kegiatan rumah tangga daerah itu sendiri. Pengertian pajak daerah dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah “sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah Daerah yang di manfaatkan untuk membiayai kepentingan atau bahkan kegiatan pemerintah Daerah dan dipungut berlandaskan Undang-Undang serta berperilaku memaksa, dan tidak ada prestasi langsung yang diberikan.”

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan tentang berbagai macam jenis pajak daerah yang terkandung di dalamnya. Pajak tersebut seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan, pajak sarang burung walet, pajak reklame, pajak restoran, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak mineral bukan logam, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak bea perolehan hak atas tanah. Kota Batu sebagai daerah otonomi diharuskan menanggung keperluan biaya rumah tangganya sendiri. Demi terlaksananya dengan lancar mengenai otonomi daerah itu, bagian pemerintahan Kota Batu dirasa perlu melakukan penggalan pajak yang dalam hal ini pajak daerah.

Kota Batu memiliki kondisi geografis alam yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang, air terjun, dan lain sebagainya. Selain itu, tata lingkungan yang alami juga terdapat di kota ini seperti sumber mata air tanah dan sumber mata air panas. Dengan keindahan alam dan juga ditunjang dengan udara yang sejuk menjadikan Kota Batu sebagai jujukan wisata dari para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun manca negara. Kondisi ini membawa daya tarik para pengusaha untuk membuka usahanya dalam bidang hotel dan restoran yang terdapat di apel ini. Pertumbuhan hotel dan restoran dalam hal jumlah itu akan membantu pemerintah daerah kota wisata ini untuk melakukan kegiatan pembangunan. Sebab dengan peningkatan itu pasti dengan otomatis akan memperbanyak pendapatan pajak daerah kota apel ini.

Tabel 1 menerangkan tentang wajib pajak dari pajak hotel dan pajak restoran dari segi jumlahnya yang dimulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Tabel 2 menunjukkan adanya kenaikan wajib pajak dari kedua pajak itu. Fenomena ini berdampak pada potensi yang dapat digali dari kedua pajak ini dapat meningkat tiap tahunnya. Potensi adalah kemampuan dari diri seseorang atau hal lain yang dapat digali dan atau bahkan dikembangkan (Prakosa, 2005:145).

**Tabel 1 : Potensi wajib pajak hotel dan pajak restoran Kota Batu tahun anggaran 2011-2013**

Tahun	Bintang		Non Bintang	
	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
2011	8	749	68	1874
2012	9	1103	72	2188
2013	10	1302	77	2309

Tahun	Klasifikasi Restoran			Total
	Besar	Sedang	Kecil	
2011	20	70	378	468
2012	19	61	378	458
2013	27	64	378	469

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis potensi, efektivitas, laju pertumbuhan, serta kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul “**ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BATU**”.

## KAJIAN PUSTAKA

### Perpajakan

#### a. Definisi pajak

Pajak ialah sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah Negara yang di manfaatkan untuk membiayai kepentingan atau bahkan kegiatan pemerintah Negara dan dipungut berlandaskan Undang-Undang serta berperilaku memaksa, dan tidak ada prestasi langsung yang diberikan.(Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)).

#### b. Ciri-ciri pajak

Ciri-ciri pajak antara lain: bersifat sumbangan dari rakyat, yang bersifat memaksa, yang melakukan penagihan ialah negara, digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah, dan tidak terdapat timbal balik secara langsung.

### **Pajak Daerah**

- a. Definisi pajak daerah  
Pajak Daerah ialah sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah Daerah yang di manfaatkan untuk membiayai kepentingan atau bahkan kegiatan pemerintah Daerah dan dipungut berdasarkan Undang-Undang serta berperilaku memaksa, dan tidak ada prestasi langsung yang diberikan.(UU No.28 Tahun 2009)
- b. Jenis pajak daerah
  1. Pajak Propinsi; antara lain pajak bea balik nama, pajak air permukaan, pajak bahan bakar, pajak rokok, kendaraan bermotor.
  2. Pajak Kabupaten/kota; antara lain pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak sarang burung walet, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak parkir.

### **Pajak Hotel**

- a. Definisi pajak hotel  
Pajak Hotel adalah sumbangan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel kepada para tamu atau konsumen yang menggunakan pelayanan yang diberikan hotel.(UU No. 28 tahun 2009 pasal 1 angka 20)
- b. Dasar hukum pemungutan  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Objek pajak  
Objek Pajak Hotel adalah berbagai macam pelayanan yang disediakan oleh hotel yang untuk mengetahuinya digunakan sistem transaksi pembayaran oleh konsumen.
- d. Subjek dan wajib pajak  
Subjek pajak pada pajak hotel adalah penyewa/pemakai hotel yang melakukan transaksi kepada yang mengusahakan hotel atau dapat disebut pula pemilik hotel. Untuk wajib pajak hotel ialah yang telah mengusahakan hotel dan atau pemilik hotel.
- e. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah besaran transaksi pembayaran yang dibayar oleh pemakai jasa hotel kepada hotel(Siahaan, 2010:304). Sedangkan tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

### **Pajak Restoran**

- a. Definisi pajak restoran  
Pajak Restoran adalah sumbangan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran kepada para tamu atau konsumen yang menggunakan pelayanan yang telah disediakan dan juga dilaksanakan oleh restoran.(UU No. 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23).
- b. Dasar hukum pemungutan  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Objek pajak  
Objek pajak restoran adalah berbagai macam pelayanan yang disediakan oleh restoran yang untuk mengetahuinya digunakan sistem transaksi pembayaran oleh konsumen.
- d. Subjek dan wajib pajak  
Subjek pajak pada pajak restoran adalah penyewa/pemakai hotel yang melakukan transaksi kepada yang mengusahakan restoran atau dapat disebut pula pemilik restoran. Untuk wajib pajak restoran ialah yang telah mengusahakan restoran dan atau pemilik restoran.
- e. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan  
Dasar pengenaan pajak restoran adalah besaran transaksi pembayaran yang dibayar oleh pemakai jasa rfestoran kepada restoran (Siahaan, 2010:331). Sedangkan tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

### **Potensi, Efektivitas, Laju Pertumbuhan, dan Kontribusi**

- a. *Definisi potensi.* Potensi adalah kemampuan dari diri seseorang atau hal lain yang dapat digali dan atau bahkan dikembangkan (Prakosa, 2005:42).  
Cara mengetahui potensi dari pajak hotel  
Potensi Pajak Hotel =  $Y1 \times \text{Tarif Pajak}$   
Keterangan:

$$Y1 = A \times B \times C \times D$$

dimana Y1 adalah jumlah pembayaran yang diterima untuk hotel, A adalah jumlah kamar, B adalah rata-rata tarif, C adalah jumlah hari, D adalah tingkat hunian.

Cara menghitung potensi dari pajak restoran  
Potensi Pajak Restoran = Y1 x Tarif Pajak  
Keterangan:

$$Y1 = E \times F \times G \times H$$

dimana Y1 adalah jumlah pembayaran yang diterima untuk restoran, E adalah jumlah objek pajak, F adalah rata-rata pengunjung, G adalah rata-rata harga, H adalah jumlah hari (Sumber : Harun, 2003:6)

- b. *Definisi Efektivitas*. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Rumus untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

(Sumber : Halim, 2004:168)

Indikator untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran :

Lebih dari 100% = Sangat efektif

90%-100% = Efektif

80%-90% = Cukup efektif

60%-80% = Kurang efektif

Kurang dari 60% = Tidak efektif

(Sumber : Nurlan, 2006 :49)

- c. *Definisi Laju Pertumbuhan*. Laju pertumbuhan pajak ialah indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah guna mempertahankan keberhasilan dan bahkan meningkatkannya di tahun selanjutnya. Untuk mengukurnya digunakan rumusan sebagai berikut:

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

dimana Gx adalah Laju pertumbuhan Pajak per tahun,  $X_t$  adalah Realisasi Pajak tahun tertentu,  $X_{(t-1)}$  adalah Realisasi penerimaan Pajak tahun sebelumnya. (Sumber: Halim 2004:163)

Kriteria laju pertumbuhan dapat dilihat di bawah ini:

85% - 100% = Sangat Berhasil

70% -85% = Berhasil

55% - 70% = Cukup Berhasil

30% - 55% = Kurang Berhasil

Kurang dari 30% = Tidak Berhasil

Sumber : Idirwan dalam Halim (2007:291)

- d. *Definisi Kontribusi*. Menurut Kamus Besar Indonesia, pengertian kontribusi adalah

sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Untuk menghitung tingkat kontribusi dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Pa = \frac{QXn}{QZn} \times 100\%$$

Pa adalah sumbangan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, QZ adalah besaran Pendapatan Asli Daerah, QX adalah besaran pajak hotel dan restoran, n adalah tahun (periode tertentu) (Sumber : Halim, 2004:167)

Di bawah ini Indikasi tingkat kontribusi:

0,00% - 10% = Sangat Kurang

>10,10%- 20% = Kurang

>20,10%- 30% = Sedang

>30,10%- 40% = Cukup Baik

>40,10%- 50% = Baik

Lebih dari 50% = Sangat Baik

(Sumber : Depdagri, Kemendagri No 690.900.327 Tahun 1996)

#### Sumber-sumber PAD

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah

#### METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif ialah metode dimana peneliti akan mendeskripsikan, menggambarkan, serta melukiskan penemuan yang terjadi dari penelitian yang dilakukan. Penemuan tersebut dapat mengenai wajib pajak hotel dan pajak restoran. Setelah itu akan dibandingkan antara jumlah potensi, tingkat efektivitasnya, prosentase laju pertumbuhannya dan nilai kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu yang dimulai pada tahun 2011 hingga 2013.

#### Fokus Penelitian

- Potensi, efektivitas, serta laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2011-2013.
- Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD tahun 2011-2013.

#### Teknik Analisis

1. Menghitung dan menganalisis potensi, efektivitas, dan laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran tahun anggaran 2011-2013 dengan rumus:

$$\text{Potensi Pajak} = Y1 \times \text{Tarif Pajak}$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

2. Menghitung kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Tahun anggaran 2011-2013 dengan rumus:

$$\text{Kontribusi(Pa)} = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Potensi, Efektivitas, dan Laju Pertumbuhan

#### a. Pajak Hotel

Dengan berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dihitung besarnya potensi Pajak Hotel yang terdapat di Kota Batu. Perhitungan itu dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

Potensi Pajak Hotel = Pendapatan Hotel ( $Y1$ ) x Tarif Pajak (Sumber : Harun, 2003:3)

**Tabel 2 : Potensi Pajak Hotel Kota Batu 2011-2013**

Tahun	Omzet Pertahun	Tarif Pajak	Potensi Pajak
2011	103.593.789.146,00	10%	10.359.378.914,60
2012	164.116.572.425,00	10%	16.411.657.242,50
2013	231.594.467.171,15	10%	23.159.446.717,12

Sumber : Data diolah

Dari lampiran tabel 2 dapat diketahui bahwa besarnya potensi pajak hotel Kota Batu tahun 2011 adalah Rp 10.359.378.914,60. Besarnya potensi pajak sangatlah jauh berbeda dengan realisasi Pajak Hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 3.365.076.772,00. Hal ini menunjukkan bahwa banyak potensi pajak hotel di Kota Batu yang belum digali. Dengan keadaan yang demikian, maka potensi yang diukur dengan target yang ditentukan jauh dari yang sesungguhnya ada.

Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PH}}{\text{Target PH}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 2011

$$\begin{aligned} &= \text{Efektivitas} \\ &= \frac{3.365.076.772,00}{3.000.000.000,00} \times 100\% \\ &= 112,17 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tingkat efektivitas pajak hotel di atas terdapat kenaikan tingkat efektivitas dari tiap tahunnya. Pada tahun 2011 tingkat efektivitas pajak hotel sebesar 112,17% atau bisa dikatakan sangat efektif menurut indikator yang disampaikan oleh Nurlan. Tahun 2012 dan 2013 juga menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif pula yaitu di atas 100%. Akan tetapi melihat potensi yang seharusnya bisa digali dari pajak hotel yang terdapat pada tabel 18. Realisasi penerimaan pajak hotel masih sangatlah jauh dari potensi yang seharusnya ada. Berikut ini gambaran mengenai realisasi dan potensi pajak hotel.

Dari tabel 3, dapat diketahui bahwa untuk Pajak Hotel di Kota Batu selalu memenuhi target yang dianggarkan. Pajak Hotel di tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebanyak 55,85% dari tahun 2011. Pertumbuhan di tahun 2013 sebesar 25,71%. Penurunan prosentase pertumbuhan di tahun 2013 berbanding terbalik dengan perolehan pajak yang mencapai angka Rp. 6.592.700.658,00, yang berselisih lebih banyak Rp. 1.348.209.266,00 dibandingkan jumlah penerimaan Pajak Hotel di tahun 2012. Maka dengan kata lain meskipun prosentase laju pertumbuhan pajak hotel menurun pada tahun 2013, tapi kenyataan sebenarnya penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan.

**Tabel 3 : Perbandingan realisasi dan potensi pajak hotel pada tahun 2011-2013**

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Potensi	Penggalian potensi(%)
2011	3.000.000.000,00	3.365.076.772,00	112,17	10.359.378.914,60	32,48
2012	4.300.000.000,00	5.244.491.392,00	121,96	16.411.657.242,50	31,96
2013	5.359.000.000,00	6.592.700.658,00	123,02	23.159.446.717,12	28,47

Sumber : Data diolah

Berikut ini gambaran mengenai laju pertumbuhan pajak hotel yang terdapat di Kota Batu tahun 2011-2013:



**Tabel 4 : Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Batu Tahun 2011-2013**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Xt)	Realisasi Pajak Hotel Tahun Sebelumnya (X(t-1))	Laju Pertumbuhan (Gx)
2011	3.365.076.772,00	-	-
2012	5.244.491.392,00	3.365.076.772,00	55,85%
2013	6.592.700.658,00	5.244.491.392,00	25,71%

Sumber : Data diolah

**b. Pajak Restoran**

Dari lampiran tabel 5 dapat diketahui bahwa besarnya potensi pajak restoran Kota Batu tahun 2011 adalah Rp 1.642.865.000,00. Besarnya potensi pajak sangatlah berbeda dengan realisasi Pajak Restoran yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 1.268.660.956,00. Hal ini menunjukkan bahwa banyak potensi pajak restoran di Kota Batu yang belum digali. Dengan keadaan yang demikian, maka potensi yang diukur dengan target yang ditentukan jauh dari yang sesungguhnya ada.

**Tabel 5 : Potensi Pajak Restoran Kota Batu Tahun 2011-2013**

Tahun	Omzet pertahun	Tarif Pajak	Potensi Pajak
2011	16.428.650.000,00	10%	1.642.865.000,00
2012	21.508.537.500,00	10%	2.150.853.750,00
2013	39.277.650.000,00	10%	3.927.765.000,00

Sumber : Data diolah

Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{\text{Realisasi PR}}{\text{Target PR}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2011

$$= \frac{Efektifitas}{1.268.660,956,00} \times 100\% = 170,29$$

Dari perhitungan tingkat efektivitas pajak restoran di atas terdapat pergerakan yang fluktuatif pada tingkat efektivitas dari tiap tahunnya. Pada tahun 2011 tingkat efektivitas pajak restoran sebesar 170,29% atau bisa dikatakan sangat efektif menurut indikator yang disampaikan oleh Nurlan. Tahun 2012 dan 2013 juga menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif pula yaitu di atas 100%. Akan tetapi melihat

potensi yang seharusnya bisa digali dari pajak restoran yang terdapat pada tabel 6. Realisasi penerimaan pajak restoran masih jauh dari potensi yang seharusnya ada. Berikut ini gambaran mengenai realisasi dan potensi pajak restoran.

Tabel 6 menjelaskan tentang perbandingan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan potensi yang seharusnya bisa digali dari pajak restoran pada tahun 2011-2013. Berdasarkan pemaparan pada tabel 7, nampak jelas bahwa meskipun tingkat efektivitas pajak restoran dapat dikatakan sangat efektif atau berada pada tingkat di atas 100%.

Akan tetapi penggalan potensi dari realisasi penerimaan pajak restoran masih bisa dikatakan cukup efektif. Hal ini nampak dari prosentase penggalan potensi yang terdapat pada tabel 7. Prosentase penggalan potensi pajak restoran pada tahun 2011 mencapai 77,22% dari potensi yang seharusnya digali dari pajak restoran. Sementara itu untuk tahun 2012 prosentase penggalan potensi dari pajak restoran mencapai 78,90% dari potensi yang seharusnya didapatkan. Prosentase penggalan potensi pada tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2013 prosentase penggalan pajak restoran mencapai 58,05% dari potensi yang seharusnya didapatkan. Prosentase penggalan pada tahun ini juga mengalami penurunan dari tahun 2012. Pada pajak restoran prosentase penggalan potensi yang tertinggi terdapat pada tahun 2012 dan yang terendah terdapat pada tahun 2013. Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa prosentase penggalan potensi pajak restoran selalu berfluktuasi setiap tahunnya.

**Tabel 6 : Perbandingan realisasi dan potensi pajak restoran pada tahun 2011-2013**

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Potensi	Penggalan potensi (%)
2011	745.000.000,00	1.268.660.956,00	170,29	1.642.865.000,00	77,22
2012	1.376.000.000,00	1.697.000.000,00	123,34	2.150.853.750,00	78,90
2013	1.800.000.000,00	2.280.251.940,00	126,68	3.927.765.000,00	58,05

Sumber : Data diolah

Dari tabel 8, dapat diketahui bahwa Pajak Restoran di Kota Batu selalu memenuhi target yang dianggarkan dan selalu

mengalami peningkatan dari tiap tahunnya. Pajak Restoran ditahun 2012 mengalami pertumbuhan sebanyak 33,78% atau sebesar Rp. 428.507.165,00 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2011. Pajak Restoran pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan sebesar 34,36% atau sebesar Rp. 583.083.819,00 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012. Selisih pertumbuhan pajak di antara kedua tahun anggaran ini kira-kira sebesar 0,58%.

Berikut ini gambaran mengenai laju pertumbuhan pajak restoran yang terdapat di Kota Batu tahun 2011-2013:

**Tabel 7 : Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Batu tahun 2011-2013**

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Xt)	Realisasi Pajak Restoran Tahun Sebelumnya (X(t-1))	Laju Pertumbuhan (Gx)
2011	1.268.660.956,00	-	-
2012	1.697.168.121,00	1.268.660.956,00	33,78%
2013	2.280.251.940,00	1.697.168.121,00	34,36%

Sumber : Data diolah

Dengan melihat penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pemungutan Pajak Restoran di Kota Batu pada tahun 2011 sampai tahun 2013.

## Kontribusi

### a. Pajak Hotel

Kontribusi pendapatan ini bermanfaat untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk menghitung Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan rumus :

$$Pa = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

**Tabel 8 : Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu 2011-2013**

Tahun	Penerimaan PAD	Penerimaan Pajak Hotel	Kontribusi (%)
2011	30.064.086.911,55	3.365.076.772,00	11,19%
2012	38.794.059.670,38	5.244.491.392,00	13,52%
2013	59.670.241.827,89	6.592.700.658,00	11,05%

Sumber : Data diolah

Tabel 8 menggambarkan mengenai prosentase tingkat kontribusi dari Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Prosentase kontribusi Pajak Hotel di tahun

2011 sebesar 11,19%(kurang). Prosentase kontribusi Pajak Hotel di tahun 2012 sebesar 13,52% (kurang). Prosentase kontribusi Pajak Hotel di tahun 2013 sebesar 11,05% (kurang).

### b. Pajak Restoran

**Tabel 9 : Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu 2011-2013**

Tahun	Penerimaan PAD	Penerimaan Restoran	Kontribusi
2011	30.064.086.911,55	1.268.660.956,00	4,22%
2012	38.794.059.670,38	1.697.168.121,00	4,37%
2013	59.670.241.827,89	2.280.251.940,00	3,82%

Sumber : Data diolah

Tabel 9 menggambarkan mengenai prosentase tingkat kontribusi dari Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Prosentase kontribusi Pajak Restoran di tahun 2011 mencapai 4,22% (sangat kurang). Prosentase kontribusi Pajak Restoran di tahun 2012 mencapai 4,37% (sangat kurang) Prosentase kontribusi Pajak Restoran di tahun 2013 mencapai 3,82% (sangat kurang).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Batu tahun anggaran 2011-2013. Pajak Hotel menunjukkan hasil sebesar Rp. 10.359.378.914,60 pada tahun 2011, kemudian Rp. 16.411.657.242,50 pada tahun 2012, dan Rp. 23.159.446.717,12 pada tahun 2013. Pajak Restoran menunjukkan hasil sebesar Rp. 1.642.865.000,00 pada tahun 2011, kemudian Rp. 2.150.853.750,00 pada tahun 2012, dan Rp. 3.927.765.000,00 di tahun 2013.
2. Hasil perhitungan efektivitas Pajak Hotel dan dan Pajak Restoran selalu menunjukkan indikasi tingkat yang sangat efektif. Tingkat efektivitas di tahun 2011 pada Pajak Hotel mencapai 112,17% sedangkan Pajak Restoran mencapai tingkat efektivitas sebesar 170,29. Tahun 2012 tingkat efektivitas Pajak Hotel berada di angka 121,96% dan Pajak Restoran 123,34%. Sementara untuk tahun 2013 tingkat efektivitas Pajak Hotel mencapai 123,02% dan Pajak Restoran mencapai 126,68. Tingkat efektivitas kedua pajak ini

mengalami fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Akan tetapi meskipun memiliki indikator keefektifan yang sangat efektif, realisasi penerimaan kedua pajak ini masih sangat jauh dari potensi yang sesungguhnya dapat digali dari kedua pajak ini. Prosentase penggalan potensi dari Pajak Hotel misalnya hanya sekitar 32,48% dari potensi yang ada di Pajak Hotel pada tahun 2011, 31,96% pada tahun 2012, dan 28,47% pada tahun 2013. Untuk Pajak Restoran prosentase penggalan potensi cukup efektif dari pada Pajak Hotel. Prosentase penggalan potensi Pajak Restoran sebesar 77,22% di tahun 2011, 78,90% di tahun 2012 dan 58,05% pada tahun 2013. Meskipun tidak mencapai 100%, tetapi Pajak Restoran memiliki prosentase penggalan potensi yang cukup efektif dibandingkan dengan Pajak Hotel.

3. Laju pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun anggaran 2011-2013 cukup berhasil untuk Pajak Hotel dan kurang berhasil untuk Pajak Restoran. Laju pertumbuhan pajak hotel untuk tahun 2012 yaitu sebesar 55,85% dan 25,71% untuk tahun 2013. Laju pertumbuhan pajak restoran untuk tahun 2012 yaitu sebesar 33,78% dan 34,36% untuk tahun 2013.
4. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun anggaran 2011-2013 kurang. Kontribusi pajak hotel tahun 2011 sebesar 11,19%, tahun 2012 sebesar 13,52%, tahun 2013 sebesar 11,05%. Kontribusi pajak restoran sangat kurang karena pada tahun 2011 sebesar 4,22%, tahun 2012 sebesar 4,37%, tahun 2013 sebesar 3,82%. Tingkat kontribusi yang lebih baik terdapat dalam pajak hotel.

#### Saran

1. Perlu adanya inisiatif dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu untuk melakukan pendataan ulang mengenai jumlah wajib pajak dan objek pajak hotel dan pajak restoran
2. Peningkatan pengawasan dan penegakan serta pengetatan sanksi administrasi terhadap wajib pajak agar tercapai efek jera bagi pelanggarnya.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat di Dispenda Kota Batu.

4. Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu sebaiknya memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap wajib pajak atau pengusaha restoran tentang pentingnya pembayaran pajak.
5. Bagi wajib pajak seharusnya bersikap terbuka dalam melaporkan pendapatan usahanya agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terutang.
6. Perlu dibukanya layanan online yang memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak terutang. Dengan adanya layanan online ini diharapkan juga akan mengurangi tingkat kecurangan baik yang dilakukan oleh aparat pemungut pajak atau wajib pajak yang bersangkutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Depdagri Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang “*Indikator Kontribusi*”
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harun, H Hamrolie. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nurlan, Darise. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung : PT. Indeks IKAPI.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “*Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. ”
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. ”